

## **Implementasi Manajemen Syariah melalui Pendekatan Participatory Action Research (PAR) untuk Meningkatkan Kemandirian dan Tata Kelola Balai Pengajian**

Harjoni Desky<sup>1</sup>, Nur Asiah<sup>2</sup>, Naizatul Afni<sup>3</sup>, Kamaruzzaman<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

### **Corresponding Author**

Nama Penulis: Harjoni Desky

E-mail: harjonidesky@uinsuna.ac.id

### **Abstract**

*This community service program is motivated by the limited independence and governance quality of the Balai Pengajian in Punteut Village, Muara Dua District, Lhokseumawe City. These challenges are mainly caused by weak managerial systems, low congregant participation in institutional management, and the lack of systematic implementation of Sharia management principles. In fact, the Balai Pengajian plays a strategic role as a center for religious education, moral development, and social cohesion within the village community. Therefore, this program aims to implement Sharia management through a Participatory Action Research (PAR) approach to enhance institutional independence and governance at the Balai Pengajian in Punteut Village. The community service method adopts a PAR approach that emphasizes the active involvement of administrators, religious teachers, and congregants throughout all stages of the program, including problem identification, action planning, mentoring implementation, and joint evaluation and reflection. The implementation of Sharia management focuses on assisting the institution in developing structured activity planning, Sharia-compliant financial management, fair task distribution, and the internalization of Islamic values such as trust (amanah), consultation (shura), transparency, and accountability. The program results indicate an improvement in the understanding and application of Sharia management principles among Balai Pengajian administrators. Congregational participation in decision-making processes increased, and institutional governance became more organized and oriented toward public benefit (maslahah). Furthermore, the Balai Pengajian demonstrated growing independence in managing its religious and social programs sustainably. In conclusion, the PAR approach proves effective in facilitating the implementation of Sharia management and in improving the independence and governance of the Balai Pengajian in Punteut Village through a participatory and context-based process.*

**Keywords:** Sharia Management; Participatory Action Research (PAR); Balai Pengajian; Institutional Governance; Community Empowerment

### **Abstrak**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kemandirian dan kualitas tata kelola Balai Pengajian di Desa Punteut, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya sistem manajemen, rendahnya partisipasi jamaah dalam pengelolaan, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip manajemen syariah secara terstruktur. Padahal, balai pengajian memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan keagamaan, pembinaan moral, dan penguatan sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengimplementasikan manajemen syariah melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) guna meningkatkan kemandirian dan tata kelola Balai Pengajian di Desa Punteut. Metode pengabdian menggunakan pendekatan PAR yang menekankan keterlibatan aktif pengurus, ustaz, dan jamaah dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan rencana aksi, pelaksanaan pendampingan, hingga evaluasi dan refleksi bersama. Implementasi manajemen syariah dilakukan melalui pendampingan penyusunan perencanaan kegiatan, pengelolaan keuangan berbasis syariah, pembagian tugas yang adil, serta penguatan nilai-nilai amanah, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman dan praktik manajemen syariah di kalangan pengurus balai pengajian, meningkatnya partisipasi jamaah dalam pengambilan keputusan, serta perbaikan tata kelola kelembagaan yang lebih tertib dan berorientasi pada kemaslahatan. Balai pengajian juga mulai menunjukkan kemandirian dalam pengelolaan program keagamaan dan sosial secara berkelanjutan. Simpulannya, pendekatan PAR efektif dalam mengimplementasikan manajemen syariah serta meningkatkan kemandirian dan tata kelola Balai Pengajian di Desa Punteut secara partisipatif dan kontekstual.

**Kata Kunci :** Manajemen Syariah; Participatory Action Research (PAR); Balai Pengajian; Tata Kelola Kelembagaan; Pemberdayaan Masyarakat

### **PENDAHULUAN**

Balai pengajian merupakan salah satu institusi sosial keagamaan yang memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat Muslim, khususnya di wilayah pedesaan. Keberadaan balai pengajian tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran Al-Qur'an dan kajian keislaman, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral, penguatan nilai-nilai sosial, serta sarana pembentukan karakter masyarakat berbasis ajaran Islam (Azra, 2017). Dalam konteks Aceh, balai pengajian memiliki posisi yang semakin penting seiring dengan penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial dan kelembagaan masyarakat (Ali & Abdullah, 2020).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak balai pengajian yang masih menghadapi berbagai permasalahan kelembagaan, terutama terkait dengan kemandirian dan tata kelola organisasi. Balai Pengajian di Desa Punteut, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, merupakan salah satu contoh lembaga keagamaan yang memiliki potensi besar, tetapi belum dikelola secara optimal. Permasalahan yang dihadapi antara lain lemahnya sistem manajemen kelembagaan, belum adanya perencanaan kegiatan yang terstruktur, pengelolaan keuangan yang masih bersifat informal, serta rendahnya partisipasi jamaah dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan inovasi program dan ketergantungan balai pengajian pada pihak-pihak tertentu (observasi awal, 2025).

Secara teoritis, lemahnya tata kelola kelembagaan keagamaan sering kali disebabkan oleh belum diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang sistematis dan berkelanjutan (Terry, 2018). Dalam perspektif Islam, manajemen tidak hanya dipahami sebagai proses teknis pengelolaan

organisasi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai syariah seperti keadilan ('adl), kejujuran (sidq), tanggung jawab (amanah), musyawarah (shura), dan orientasi pada kemaslahatan (masalah) (Antonio, 2019). Manajemen syariah menekankan keseimbangan antara pencapaian tujuan organisasi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan spiritual Islam (Hafidhuddin & Tanjung, 2018).

Sayangnya, dalam praktiknya, banyak lembaga sosial keagamaan belum mengimplementasikan manajemen syariah secara terstruktur. Pengelolaan sering kali bersifat tradisional, berbasis kebiasaan, dan kurang terdokumentasi, sehingga menyulitkan proses evaluasi dan pengembangan kelembagaan (Rahman, 2021). Hal ini juga terjadi pada Balai Pengajian di Desa Punteut, di mana fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan belum berjalan secara optimal. Padahal, penerapan manajemen syariah yang baik diyakini dapat meningkatkan kemandirian lembaga, memperkuat kepercayaan jamaah, serta mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas (Yusuf, 2020).

Selain aspek manajerial, rendahnya partisipasi jamaah dalam pengelolaan balai pengajian juga menjadi permasalahan penting. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan lembaga sosial keagamaan, karena lembaga tersebut pada dasarnya tumbuh dan berkembang dari, oleh, dan untuk masyarakat (Mardikanto, 2019). Minimnya keterlibatan jamaah tidak hanya melemahkan rasa memiliki (sense of ownership), tetapi juga menghambat proses regenerasi kepengurusan dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengabdian yang tidak bersifat top-down, melainkan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) dipandang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut. PAR merupakan pendekatan penelitian dan pengabdian yang menekankan kolaborasi antara akademisi dan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merancang tindakan, melaksanakan perubahan, serta melakukan refleksi secara berkelanjutan (Kemmis & McTaggart, 2014). Dalam konteks pengabdian masyarakat, PAR tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada proses pemberdayaan dan transformasi sosial (Kendon, Pain, & Kesby, 2017). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan musyawarah, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif dalam membangun kehidupan sosial.

Beberapa kegiatan pengabdian sebelumnya telah mengkaji penguatan kelembagaan keagamaan atau manajemen masjid dan balai pengajian. Namun, sebagian besar masih berfokus pada pelatihan manajerial secara konvensional dan bersifat jangka pendek, tanpa melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan (Suryadi, 2022). Selain itu, kajian dan pengabdian yang secara spesifik mengintegrasikan manajemen syariah dengan pendekatan PAR pada level balai pengajian desa masih relatif terbatas. Gap inilah yang menjadi dasar pentingnya pelaksanaan pengabdian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengimplementasikan manajemen syariah melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) guna meningkatkan kemandirian dan tata kelola Balai Pengajian di Desa Punteut, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Secara khusus, pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman pengurus dan jamaah terhadap prinsip-prinsip manajemen syariah; (2) mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan balai pengajian; dan (3) memperkuat tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada

kemaslahatan. Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan lembaga sosial keagamaan di tingkat desa serta menjadi model pengabdian berbasis nilai-nilai Islam yang partisipatif dan berkelanjutan.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu suatu pendekatan yang mengintegrasikan proses penelitian dan aksi sosial secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama perubahan (Kemmis & McTaggart, 2014). PAR dipilih karena relevan dengan tujuan pengabdian yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan penguatan kelembagaan Balai Pengajian di Desa Punteut, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran bersama (co-learning) antara tim pengabdian dan masyarakat, sehingga perubahan yang dihasilkan bersifat kontekstual dan berkelanjutan (Kendon, Pain, & Kesby, 2017).

### **Desain dan Pendekatan Pengabdian**

Secara konseptual, PAR dilaksanakan melalui siklus berulang yang meliputi tahap perencanaan (planning), tindakan (action), observasi (observation), dan refleksi (reflection) (Kemmis & McTaggart, 2014). Siklus ini dirancang secara fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kebutuhan Balai Pengajian. Dalam konteks pengabdian ini, PAR dipadukan dengan prinsip-prinsip manajemen syariah yang menekankan nilai amanah, musyawarah (shura), keadilan ('adl), transparansi, dan orientasi pada kemaslahatan (Hafidhuddin & Tanjung, 2018). Integrasi ini bertujuan agar proses dan hasil pengabdian tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar operasional balai pengajian.

### **Subjek dan Lokasi Pengabdian**

Subjek pengabdian meliputi pengurus Balai Pengajian di Desa Punteut, ustaz/teungku yang terlibat dalam kegiatan pengajian, serta jamaah aktif yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan peran strategis mereka dalam pengelolaan balai pengajian (Sugiyono, 2019). Lokasi pengabdian dipusatkan di Balai Pengajian Desa Punteut, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat setempat.

### **Tahap Identifikasi Masalah (Diagnosing)**

Tahap awal pengabdian difokuskan pada identifikasi masalah dan kebutuhan (need assessment) secara partisipatif. Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), wawancara mendalam dengan pengurus dan ustaz, serta observasi langsung terhadap aktivitas balai pengajian. Pendekatan partisipatif dalam tahap ini bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan aspirasi masyarakat terkait kondisi kelembagaan balai pengajian (Chambers, 2017). Hasil identifikasi menunjukkan adanya permasalahan utama berupa lemahnya sistem manajemen, belum adanya perencanaan program yang terdokumentasi, pengelolaan keuangan yang belum berbasis prinsip syariah secara formal, serta rendahnya partisipasi jamaah dalam proses pengambilan keputusan.

### **Tahap Perencanaan Tindakan (Action Planning)**

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, tahap selanjutnya adalah perencanaan tindakan yang dilakukan secara kolaboratif antara tim pengabdian dan pemangku kepentingan balai pengajian. Proses perencanaan ini dilakukan melalui musyawarah bersama yang menekankan prinsip shura sebagai nilai utama dalam manajemen syariah (Antonio, 2019). Dalam tahap ini, dirumuskan rencana aksi yang mencakup penyusunan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang adil, penyusunan program kerja jangka pendek dan menengah, serta perancangan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Rencana aksi disepakati bersama untuk memastikan adanya rasa memiliki dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat (Mardikanto, 2019).

#### **Tahap Pelaksanaan Tindakan (Action)**

Tahap pelaksanaan tindakan dilakukan melalui serangkaian kegiatan pendampingan dan pelatihan yang bersifat aplikatif. Pendampingan manajemen syariah difokuskan pada penguatan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling), dengan pendekatan nilai-nilai Islam (Terry, 2018; Hafidhuddin & Tanjung, 2018). Kegiatan ini meliputi pendampingan penyusunan rencana kegiatan tahunan, pencatatan keuangan berbasis syariah, serta mekanisme pelaporan yang transparan kepada jamaah. Selain itu, dilakukan penguatan kapasitas pengurus melalui diskusi dan praktik langsung agar materi yang disampaikan dapat diterapkan secara nyata dalam aktivitas balai pengajian.

#### **Tahap Observasi dan Monitoring**

Selama tahap pelaksanaan, dilakukan observasi dan monitoring secara berkelanjutan untuk menilai proses dan dampak dari tindakan yang telah dilakukan. Observasi dilakukan dengan memperhatikan tingkat partisipasi jamaah, perubahan pola pengelolaan, serta dinamika hubungan antar pengurus dan jamaah. Monitoring juga dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap capaian program dan kendala yang dihadapi. Data observasi dan monitoring ini menjadi dasar penting untuk proses refleksi dan perbaikan tindakan pada siklus berikutnya (Kemmis & McTaggart, 2014).

#### **Tahap Refleksi dan Evaluasi**

Refleksi merupakan tahap kunci dalam pendekatan PAR. Refleksi dilakukan secara kolektif melalui forum diskusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dalam tahap ini, pengurus dan jamaah diajak untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen syariah, mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan, serta merumuskan langkah perbaikan ke depan. Proses refleksi ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi teknis, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bersama dan penguatan kesadaran kritis masyarakat (Freire, 2005). Hasil refleksi menjadi dasar bagi keberlanjutan program dan pengembangan kelembagaan balai pengajian secara mandiri.

#### **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Data dalam kegiatan pengabdian ini dikumpulkan melalui wawancara, FGD, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu mengorganisasikan data, menginterpretasikan temuan, dan mengaitkannya dengan teori manajemen syariah dan pemberdayaan masyarakat (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap proses dan dampak pengabdian secara kontekstual. Dengan metode PAR yang sistematis dan partisipatif ini, pengabdian diharapkan mampu menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola dan kemandirian Balai Pengajian di Desa Punteut, serta menjadi model pengabdian berbasis manajemen syariah yang adaptif dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengabdian

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) di Balai Pengajian Desa Punteut menghasilkan sejumlah perubahan signifikan baik pada aspek kelembagaan, manajerial, maupun partisipasi jamaah. Hasil pengabdian ini diukur berdasarkan indikator keberhasilan yang telah disepakati bersama pada tahap perencanaan tindakan, yaitu penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas manajemen syariah, meningkatnya partisipasi jamaah, serta tumbuhnya kemandirian balai pengajian dalam pengelolaan program.

#### 1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan

Sebelum pelaksanaan pengabdian, struktur organisasi Balai Pengajian belum tertata secara jelas, pembagian tugas bersifat informal, dan belum terdapat dokumen perencanaan kegiatan yang sistematis. Melalui pendampingan berbasis PAR, pengurus bersama jamaah berhasil menyusun struktur organisasi yang jelas, menetapkan tugas dan fungsi masing-masing pengurus, serta menyusun rencana kerja tahunan balai pengajian. Proses ini dilakukan secara musyawarah sehingga seluruh pihak merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberlangsungan lembaga.



Gambar 1.

Diskusi Kelompok Terarah (FGD) antara tim pengabdian, pengurus, dan jamaah Balai Pengajian Desa Punteut dalam tahap perencanaan tindakan.

#### 2. Penerapan Manajemen Keuangan Berbasis Syariah

Hasil pengabdian menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan keuangan balai pengajian. Sebelumnya, pencatatan keuangan dilakukan secara sederhana dan tidak terdokumentasi dengan baik. Setelah pendampingan, pengurus mulai menerapkan pencatatan keuangan berbasis prinsip syariah yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan amanah. Laporan keuangan sederhana disusun dan disampaikan secara berkala kepada jamaah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Tabel 1.

Perbandingan Kondisi Balai Pengajian Sebelum dan Sesudah Pengabdian

Indikator	Sebelum Pengabdian	Sesudah Pengabdian
Struktur Manajemen	Tidak jelas	Jelas dan terdokumentasi
Pengelolaan Keuangan	Informal	Berbasis syariah dan transparan

Indikator	Sebelum Pengabdian	Sesudah Pengabdian
Partisipasi Jamaah	Rendah	Meningkat
Keberlanjutan Program	Terbatas	Lebih mandiri dan berkelanjutan

### 3. Peningkatan Partisipasi Jamaah

Salah satu capaian penting dari pengabdian ini adalah meningkatnya partisipasi jamaah dalam pengelolaan balai pengajian. Melalui pendekatan PAR, jamaah tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, hingga evaluasi program. Keterlibatan ini mendorong tumbuhnya rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap balai pengajian, sehingga jamaah lebih aktif memberikan ide, tenaga, dan dukungan material.



**Gambar 2.**

Kegiatan musyawarah jamaah dalam evaluasi dan refleksi program pengabdian.

### 4. Peningkatan Kemandirian Lembaga

Hasil pengabdian juga menunjukkan tumbuhnya kemandirian Balai Pengajian Desa Punteut. Balai pengajian mulai mampu merancang dan melaksanakan program keagamaan dan sosial secara mandiri, tanpa ketergantungan penuh pada pihak eksternal. Pengurus dan jamaah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perencanaan, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi berkelanjutan.

#### **Pembahasan**

Temuan hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan Participatory Action Research (PAR) memiliki efektivitas yang tinggi dalam mengimplementasikan manajemen syariah pada lembaga keagamaan tingkat desa, khususnya Balai Pengajian di Desa Punteut, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Efektivitas tersebut terlihat dari perubahan nyata pada tata kelola kelembagaan, meningkatnya partisipasi jamaah, serta tumbuhnya kemandirian balai pengajian dalam merancang dan mengelola program keagamaan dan sosial. Hal ini menguatkan pandangan Kemmis dan McTaggart (2014) yang menegaskan bahwa PAR bukan sekadar metode teknis, melainkan sebuah proses transformasi sosial yang berbasis refleksi kritis dan partisipasi aktif masyarakat.

Keterlibatan pengurus, ustaz, dan jamaah dalam seluruh tahapan pengabdian—mulai dari identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan, hingga refleksi—menjadi faktor kunci

keberhasilan program ini. Proses partisipatif tersebut mendorong perubahan relasi antara pengurus dan jamaah, dari pola pengelolaan yang sebelumnya bersifat elitis dan terpusat menjadi lebih inklusif dan kolektif. Jamaah tidak lagi diposisikan sebagai penerima manfaat pasif, tetapi sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pengelolaan balai pengajian. Temuan ini sejalan dengan prinsip dasar PAR yang menempatkan masyarakat sebagai agen perubahan (Kendon, Pain, & Kesby, 2017).

Dari perspektif manajemen syariah, penerapan nilai-nilai amanah, musyawarah (shura), keadilan ('adl), dan transparansi terbukti mampu memperkuat tata kelola balai pengajian secara signifikan. Sebelum pengabdian dilaksanakan, pengelolaan balai pengajian cenderung bersifat informal, tidak terdokumentasi dengan baik, dan bergantung pada kebiasaan yang telah berlangsung lama. Melalui pendampingan manajemen syariah, pengurus mulai memahami bahwa pengelolaan lembaga keagamaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada jamaah, tetapi juga secara moral dan spiritual kepada Allah SWT. Hal ini memperkuat argumen Hafidhuddin dan Tanjung (2018) bahwa manajemen syariah memiliki keunggulan karena mengintegrasikan dimensi teknis, etis, dan spiritual dalam pengelolaan organisasi.

Peningkatan transparansi keuangan menjadi salah satu dampak paling nyata dari pengabdian ini. Penyusunan laporan keuangan sederhana berbasis prinsip syariah dan penyampaian laporan tersebut kepada jamaah secara berkala telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap balai pengajian. Kepercayaan ini berdampak langsung pada meningkatnya partisipasi jamaah, baik dalam bentuk kehadiran pada kegiatan musyawarah, kontribusi pemikiran, maupun dukungan sumber daya. Temuan ini memperkuat pandangan Yusuf (2020) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan lembaga sosial keagamaan.

Selain aspek tata kelola dan keuangan, pengabdian ini juga berdampak pada peningkatan kapasitas pengurus dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara lebih sistematis. Pengurus mulai mampu menyusun perencanaan kegiatan, mengorganisasikan sumber daya, melaksanakan program secara terstruktur, serta melakukan evaluasi secara berkala. Penguatan fungsi-fungsi manajemen ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen syariah tidak bertentangan dengan prinsip manajemen modern, bahkan saling melengkapi (Terry, 2018). Dengan demikian, manajemen syariah dapat dipahami sebagai pendekatan holistik yang relevan untuk pengelolaan lembaga keagamaan di tingkat akar rumput.

Jika dibandingkan dengan kegiatan pengabdian sebelumnya yang cenderung bersifat top-down dan berorientasi pada pelatihan jangka pendek (Suryadi, 2022), pengabdian ini menunjukkan keunggulan yang signifikan. Integrasi antara PAR dan manajemen syariah memungkinkan terjadinya proses pendampingan yang berkelanjutan dan kontekstual. Alih-alih hanya mentransfer pengetahuan, pengabdian ini mendorong terjadinya perubahan perilaku dan pola pikir pengurus serta jamaah. Dengan demikian, gap pengabdian sebelumnya yang minim partisipasi dan kurang berkelanjutan dapat dijumpai melalui pendekatan yang lebih inklusif dan reflektif.

Dari sisi indikator keberhasilan, pengabdian ini telah mencapai target yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Indikator tata kelola kelembagaan menunjukkan adanya perbaikan yang ditandai dengan tersusunnya struktur organisasi dan rencana kerja yang jelas. Indikator partisipasi masyarakat tercermin dari meningkatnya keterlibatan jamaah dalam musyawarah dan pengambilan keputusan. Sementara itu, indikator kemandirian lembaga terlihat dari kemampuan balai pengajian dalam

merancang dan melaksanakan program secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada pihak eksternal. Capaian indikator ini menunjukkan bahwa pengabdian tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga secara substantif.

Lebih jauh, hasil pengabdian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan model pengabdian masyarakat berbasis nilai-nilai Islam. Pendekatan PAR yang dipadukan dengan manajemen syariah terbukti mampu menjawab tantangan kelembagaan di tingkat desa, khususnya pada lembaga keagamaan yang selama ini kurang tersentuh oleh inovasi manajerial. Model ini berpotensi direplikasi pada balai pengajian atau lembaga sosial keagamaan lain di wilayah pedesaan dengan karakteristik serupa, terutama di daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap penerapan nilai-nilai syariah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa pengabdian berbasis PAR dan manajemen syariah tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan kapasitas pengurus, tetapi juga mendorong transformasi kelembagaan yang lebih berkelanjutan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama perubahan dan menjadikan nilai-nilai syariah sebagai landasan pengelolaan, pengabdian ini memberikan kontribusi nyata bagi penguatan lembaga keagamaan desa dan pemberdayaan masyarakat secara holistik.

## **KESIMPULAN**

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) menunjukkan bahwa implementasi manajemen syariah mampu meningkatkan kemandirian dan tata kelola Balai Pengajian di Desa Punteut, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe secara signifikan. Pendekatan PAR terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan aktif pengurus, ustaz, dan jamaah dalam seluruh tahapan pengabdian, sehingga proses perubahan tidak bersifat top-down, melainkan tumbuh dari kesadaran dan kebutuhan internal masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip manajemen syariah seperti amanah, musyawarah (shura), keadilan, transparansi, dan akuntabilitas telah memperkuat tata kelola kelembagaan balai pengajian. Perubahan tersebut tercermin dalam tersusunnya struktur organisasi yang lebih jelas, adanya perencanaan program yang terarah, pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan berbasis syariah, serta meningkatnya partisipasi jamaah dalam pengambilan keputusan. Capaian ini menunjukkan bahwa manajemen syariah tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga aplikatif dalam konteks pengelolaan lembaga keagamaan di tingkat desa.

Selain itu, pengabdian ini berhasil mendorong tumbuhnya kemandirian balai pengajian dalam mengelola program keagamaan dan sosial secara berkelanjutan. Balai pengajian tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pihak eksternal, melainkan mulai mengoptimalkan potensi internal jamaah dan sumber daya lokal. Dengan demikian, pengabdian ini memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kelembagaan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara holistik.

## **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil dan temuan pengabdian, beberapa rekomendasi yang bersifat strategis dan berorientasi kebijakan dapat diajukan sebagai berikut.

Pertama, bagi pengelola Balai Pengajian, disarankan untuk menjadikan manajemen syariah sebagai pedoman utama dalam pengelolaan kelembagaan secara berkelanjutan. Pengurus perlu melakukan evaluasi rutin terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dengan tetap

mengedepankan prinsip amanah, musyawarah, dan transparansi. Penguatan kapasitas pengurus melalui pelatihan lanjutan juga perlu dilakukan agar kualitas tata kelola dapat terus ditingkatkan.

Kedua, bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan lokal, hasil pengabdian ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan lembaga keagamaan desa. Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi, baik dalam bentuk pendampingan kelembagaan maupun integrasi program balai pengajian dengan program pembangunan desa, sehingga peran balai pengajian sebagai pusat pembinaan moral dan sosial masyarakat semakin optimal.

Ketiga, bagi perguruan tinggi dan lembaga pengabdian kepada masyarakat, pendekatan PAR yang terintegrasi dengan manajemen syariah dapat dijadikan model pengabdian yang kontekstual dan berkelanjutan. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya berperan sebagai fasilitator pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra strategis masyarakat dalam proses pemberdayaan dan transformasi kelembagaan.

Keempat, bagi peneliti dan praktisi selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan pengabdian serupa dengan cakupan yang lebih luas, baik pada lembaga keagamaan lain seperti masjid, dayah, atau lembaga sosial Islam, maupun dengan mengintegrasikan perspektif Maqasid Shariah sebagai kerangka evaluasi dampak pengabdian. Hal ini penting untuk memperkuat kontribusi teoretis dan praktis pengabdian berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, pengabdian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat lokal bagi Balai Pengajian Desa Punteut, tetapi juga menjadi rujukan kebijakan dan model praktik baik (best practice) dalam penguatan lembaga keagamaan desa berbasis manajemen syariah dan pendekatan partisipatif.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Desa Punteut atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para tokoh masyarakat, pengurus, ustaz, serta jamaah Balai Pengajian di Desa Punteut yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam setiap tahapan kegiatan pengabdian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Muara Dua atas dukungan, perhatian, dan dorongan yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh pihak terkait lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga kerja sama dan sinergi yang terjalin selama kegiatan pengabdian ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi pengembangan lembaga keagamaan dan pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Abdullah, I. (2020). *Syariat Islam dan transformasi sosial di Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Antonio, M. S. (2019). *Manajemen syariah: Teori dan praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Azra, A. (2017). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jakarta: Kencana.
- Chambers, R. (2017). *Can we know better? Reflections for development*. Rugby, UK: Practical Action Publishing.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed (30th anniversary ed.)*. New York, NY: Continuum. (Original work published 1970)
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2018). *Manajemen syariah dalam praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Singapore: Springer.
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2017). *Participatory action research approaches and methods: Connecting people, participation and place*. London: Routledge.
- Mardikanto, T. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Rahman, F. (2021). *Pengelolaan lembaga keagamaan berbasis partisipasi masyarakat*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 145–158. <https://doi.org/10.22146/jpm.XXXXX>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi. (2022). *Model pengabdian masyarakat berbasis penguatan kelembagaan masjid*. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 23–34.
- Suryadi. (2022). *Penguatan kelembagaan keagamaan melalui pelatihan manajemen berbasis masyarakat*. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 145–156.
- Terry, G. R. (2018). *Principles of management*. Homewood, IL: Richard D. Irwin.
- Yusuf, M. (2020). *Transparansi dan akuntabilitas lembaga keagamaan dalam perspektif Islam*. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 67–82.
- Yusuf, M. (2020). *Transparansi dan akuntabilitas lembaga sosial keagamaan dalam perspektif Islam*. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Islam*, 5(1), 23–37.